



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TA 2023**

BKPSDM KAB. SOLOK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok kedepan.

Arosuka, Maret 2022

KEPALA,



AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelegaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	27
3.3. Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	41
BAB V PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA BKPSDM dan Pencapaian RENSTRA BKPSDM s/d Tahun 2021	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok	16
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	19
Tabel 3.1	Tabel Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok	26
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2023	29
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	34
Tabel 4.1	Pendanaan Indikatif	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya yang disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini merupakan tahun-tahun awal

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah mengacu kepada Program Nasional dan Propinsi Sumatera Barat dengan hubungan keterkaitan sebagai berikut:

Dalam penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2023 mempedomani Misi No. 4 Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih” dengan rincian:

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang Kapabel

Indikator : Indeks Profesionalitas ASN

Sedangkan sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, pada BAB VI tabel 6.3 Program prioritas yang pada BKPSDM adalah “Peningkatan Kualitas SDM ASN” sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tata Kelola Pemerintahan

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keterangan : Pelatihan dan Diklat ASN, serta Beasiswa bagi ASN berprestasi

BKPSDM mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan kantor-kantor regional BKN yang tersebar pada dua belas wilayah kerja. Ada sebanyak 7 sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara yang secara keseluruhan masih terdapat permasalahan Pelayanan di BKPSDM sehingga Penyusunan Renja tahun 2023 diharapkan dapat mendorong pelayanan BKPSDM agar bisa sejalan dengan sasaran strategis BKN.

Selain itu BKPSDM juga memiliki hubungan fungsional dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera Barat “Meningkatnya kualitas pengelolaan Manajemen SDM Aparatur”. Penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 selain dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2023 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi juga sebagai panduan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menjabarkan review rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program yang akan dilaksanakan serta pagu indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada Tahun 2021 anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok adalah sebesar Rp.21.499.329.739,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.059.859,316,00 (93,30%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.17.060.177.468,- Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan PNS dan realisasinya sebesar Rp.16.775.490.138 atau 98,33%.
- b. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 4.439.152.271,- Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp.3.284.369.178,- atau 73,99 %.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
BPSDM Kabupaten Solok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5 03	KEPEGAWAIAN		21.499.329.739		21.499.329.739	20.059.859.316								
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	(1). Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (2). Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (3). Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	(1). 100% (2). 100% (3). 100%	17.707.848.633	0	0	(1). 100% (2). 100% (3). 100%	17.707.848.633	17.231.808.348	114%	82%	8.331.937.714	25.565.293.062	144,37%
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	118.980.000	0	0	100%	118.980.000	75.767.000	100%	66%	183.053.500	258.820.500	217,53%
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	2	22.448.000	0	0	2 Dokumen	22.448.000	2 Dokumen	100%	12,69%	6.060.000	8.909.000	39,69%
5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1	1.480.000	0	0	1 Dokumen	1.480.000	1 Dokumen	100%	60,81%	6.664.500	7.564.500	511,11%
5 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P SKPD yang disusun	1	1.472.000	0	0	1 Dokumen	1.472.000	1 Dokumen	100%	94,43%	5.644.000	7.034.000	477,85%
5 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	1	900.000	0	0	1 Dokumen	900.000	1 Dokumen	100%	100,00%	1.192.000	2.092.000	232,44%
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA-P SKPD yang disusun	1	1.956.000	0	0	1 Dokumen	1.956.000	1 Dokumen	100%	100,00%	6.080.000	8.036.000	410,84%
5 03 01 2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	2	78.380.000	0	0	2 Dokumen	78.380.000	2 Dokumen	100%	85,50%	154.448.000	221.460.000	282,55%
5 03 01 2.02 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja SKPD yang disusun	4	12.344.000	0	0	4 Dokumen	12.344.000	4 Dokumen	100%	6,16%	2.965.000	3.725.000	30,18%

5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat akurasi dalam pengelolaan keuangan SKPD	100%	17.063.565.668	0	0	100%	17.063.565.668			16.778.325.138	100%	91%		7.556.031.000	24.335.903.138	142,62%
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	14	17.060.177.468	0	0	14 bulan	17.060.177.468	14 bulan	16.775.490.138	100%	98,33%		7.552.300.000	24.327.790.138	142,60%	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan yang berlaku	1	2.343.000	0	0	1 Dokumen	2.343.000	1 Dokumen	1.815.000	100%	77,46%		2.184.000	3.999.000	170,68%	
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun sesuai aturan yang berlaku	1	1.045.200			1 Dokumen	1.045.200	1 Dokumen	1.020.000	100%	97,59%		1.547.000	2.567.000	245,60%	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	31.967.500				31.967.500		27.048.800	185%	84,61%		99.282.000	126.330.800	395,19%	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur BKPSDM yang memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	3	0	0	0		0		0	0%	0,00%		25.140.000	0	0,00%	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian	130	31.967.500	0	0	130 orang	31.967.500	240 orang	27.048.800	185%	84,61%		74.142.000	101.190.800	316,54%	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	233.539.585	0	0	100%	233.539.585		167.111.890	100%	82%		229.395.850	396.507.740	169,78%	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	3.337.235	0	0	9 jenis	3.337.235	12 jenis	3.302.350	133,3%	99,0%		2.288.850	5.591.200	167,54%	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	9	70.895.000	0	0	9 unit	70.895.000	5 unit	45.704.940	55,6%	64,5%		48.000.000	93.704.940	132,17%	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	30	28.976.750			30 jenis	28.976.750	33 jenis	26.456.500	110,0%	91,3%		15.479.500	41.936.000	144,72%	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7	15.593.600	0	0	7 paket	15.593.600	7 paket	13.978.100	100,0%	89,6%		8.182.000	22.160.100	142,11%	
										20016 lembar		20016 lembar		100,0%							
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	60	114.737.000	0	0	60 orang	114.737.000	60 orang	77.670.000	100,0%	67,7%		131.784.000	209.454.000	182,55%	
										30 kali		30 kali									
										5 kali		5 kali									

5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	22.545.200	0	0	100%	22.545.200		18.947.179	100%	94%		22.974.364	41.921.543	185,94%
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	100	1.000.000	0	0	100 lembar	1.000.000	100 lembar	1.000.000	100%	100,00%		2.100.000	3.100.000	310,00%
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air, listrik dan telepon yang dibayar	36	19.745.200	0	0	36 tagihan	19.745.200	36 tagihan	16.147.179	100%	81,78%		19.074.364	35.221.543	178,38%
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tagihan retribusi sampah yang dibayar	12	1.800.000	0	0	12 tagihan	1.800.000	12 tagihan	1.800.000	100%	100,00%		1.800.000	3.600.000	200,00%
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	237.250.680	0	0	100%	237.250.680		164.608.341	100%	72%		241.201.000	405.809.341	171,05%
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan untuk 4 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	4	167.100.000			4 unit	167.100.000	4 unit	108.456.001	100%	64,90%		129.000.000	237.456.001	142,10%
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi 1 unit gedung kantor	1	48.602.680			1 unit	48.602.680	1 unit	42.327.340	100%	87,09%		69.150.000	111.477.340	229,36%
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi 3 jenis sarana dan prasarana gedung kantor	12	21.548.000			12 unit	21.548.000	12 unit	13.825.000	100%	64,16%		43.051.000	56.876.000	263,95%
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	(1). Tingkat kepuasan PNS terhadap pelatihan administrasi kepegawaian (2). Persentase ASN yang berkembang karir (3). Indeks Profesionalitas ASN (4). Persentase ketersediaan data ASN	(1). 3,60 (2). 70% (3). 50% (4). 100%	2.240.401.576	0	0	(1). 3,60 (2). 70% (3). 50% (4). 100%	2.240.401.576	(1). 3,60 (2). 70% (3). 50% (4). 100%	1.382.584.168	99%	65%		7.100.000	3.664.584.118	163,57%
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	854.668.976	0	0	100%	854.668.976		579.671.296	99%	66%		748.957.000	1.078.628.296	126,20%
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Jumlah calon ASN yang lulus sesuai formasi	90	531.107.976	0	0	90 orang	531.107.976	90 orang	376.956.202	100%	70,98%		88.457.000	465.413.202	87,63%
						Jumlah PPPK yang lulus sesuai formasi				346 orang		346 orang								
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SKKP dan SK Pensiun yang diterbitkan	251	72.935.000	0	0	251 orang	72.935.000	251 orang	51.742.271	100%	70,94%		150.250.000	201.992.271	276,95%
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan profesi ASN	0	-	0	0		-		-				250.000.000		
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang dimutakhirkan	5.473	185.735.000	0	0	5.473 orang	185.735.000	5.363 orang	109.322.650	98%	58,86%		150.250.000	259.572.650	139,75%
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah ASN yang difasilitasi pengurusan identitas kepegawaiannya	200	64.891.000	0	0	200 orang	64.891.000	200 orang	41.650.173	100%	64,18%		110.000.000	151.650.173	233,70%

5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan	75%	1.106.110.800	0	0	75%	1.106.110.800	75%	627.467.228	97%	67%	1.222.912.950	1.850.380.178	167,29%
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan ASN yang diterbitkan	2.500	197.416.800	0	0	2.500 orang	197.416.800	2.250 orang	166.992.950	90%	84,59%	367.500.000	534.492.950	270,74%
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	50	166.250.000	0	0	130 orang	166.250.000	130 orang	114.268.400	100%	68,73%	205.412.950	319.681.350	192,29%
						Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diproses	700				850 orang		850 orang						
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Seleksi JPT Pratama	3	742.444.000			8 orang	742.444.000	8 orang	346.205.878	100%	46,63%	650.000.000	996.205.878	134,18%
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	49.916.800	0	0		49.916.800		29.859.100	107%	59,82%	150.000.000	179.859.100	360,32%
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penerbitan keputusan tentang pengangkatan, pemberhentian dan kenaikan dalam jabatan fungsional	300	49.916.800	0	0	300 SK	49.916.800	320 SK	29.859.100	107%	59,82%	150.000.000	179.859.100	360,32%
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur	100%	229.705.000				229.705.000		145.586.544	95%	67,49%	410.130.000	555.716.544	241,93%
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Saytalencana Karyasatya	400	51.421.350	0	0	200 orang	51.421.350	190 orang	34.702.650	95%	67,49%	133.402.500	168.105.150	326,92%
											400 orang		380 orang		95%				
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	100	178.283.650			100 %	178.283.650	100 %	110.883.894	100%	62,20%	276.727.500	387.611.394	217,41%
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.551.079.530				1.551.079.530		1.445.466.800	100%	93,19%	5.899.739.138	7.345.205.938	473,55%
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat	70%	1.551.079.530	0	0	70%	1.551.079.530	70%	1.445.466.800	100%	93,19%	5.899.739.138	7.345.205.938	473,55%
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	1.551.079.530	0	0	100%	1.551.079.530	100%	1.445.466.800	100%	93,19%	5.899.739.138	7.345.205.938	473,55%
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat PBJ sebanyak 20 orang	20	1.551.079.530	0	0	20 orang	1.551.079.530	20 orang	1.445.466.800	100%	93,19%	5.899.739.138	7.345.205.938	473,55%
						Jumlah Calon PNS yang mengikuti Latsar sebanyak 98 orang	98				98 orang		98 orang		100%				
								21.499.329.739				21.499.329.739		20.059.859.316			14.238.776.852	36.575.083.118	170,12%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini BKPSDM Kabupaten Solok belum memiliki standar pelayanan minimal bagi kegiatan bidang kepegawaian. Meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

Berikut pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM Kabupaten Solok:

1. Pelayanan Internal

Pelayanan internal yang diselenggarakan Sekretariat BKPSDM bersifat koordinasi dan fasilitasi seluruh program kegiatan yang dilaksanakan di BKPSDM, diantaranya:

a. Pelayanan Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- Pelayanan penyusunan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, Forum PD, RKA, DPA, RDPPA, DPPA, LKIP, LKPJ, LPPD dan Monev.
- Pelayanan gaji dan TPP, pencairan anggaran dan SPJ, laporan keuangan, CalK, neraca dan LRA.

b. Pelayanan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- Pelayanan administrasi surat menyurat (masuk dan keluar);
- Pelayanan Karis, Karsu, Karpeg, KPE, Taspen, Konversi NIP, KGB, Kenaikan Pangkat, SKUMPTK dan pensiun PNS internal BKPSDM;
- Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

2. Pelayanan Eksternal

Pelayanan eksternal BKPSDM dilaksanakan oleh bidang-bidang. Pelayanan ini mengacu pada tupoksi BKPSDM sebagai unsur pelaksana urusan kepegawaian di daerah. Pelayanan ini menyangkut seluruh PNS yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Solok.

a. Pelayanan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Subbidang Pengembangan Pegawai Fungsional Tertentu;

- Pelayanan jabatan fungsional tertentu.

Subbidang Pengembangan Pegawai Struktural dan Fungsional Umum

- Pelayanan mutasi dan perpindahan dalam dan luar daerah
- Pelayanan baperjakat dan pelantikan pejabat
- Pelayanan Tugas dan Ijin Belajar

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Pelayanan informasi diklat
- Pelayanan penyelenggaraan diklat

b. Pelayanan pada Bidang Kepangkatan, Data dan Pengadaan

Subbidang Kepangkatan

- Pelayanan kenaikan pangkat pegawai
- Pelayanan Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas.

Subbidang Data dan Informasi

- Pelayanan data dan informasi kepegawaian (SIMPEG)
- Pelayanan bezeting pegawai

Subbidang Formasi dan Pengadaan

- Pelayanan informasi seleksi penerimaan calon ASN.
- Pelayanan peningkatan status CPNS menjadi PNS dan sumpah PNS

c. Pelayanan pada Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pemberhentian Subbidang Pembinaan

- Pelayanan penyelesaian kasus-kasus pegawai
- Pelayanan SKP online

Subbidang Kesejahteraan

- Pelayanan Taspen, Karis, Karsu, Karpeg, Konversi NIP
- Pelayanan Satya Lancana Karyasatya pegawai;
- Pelayanan cuti pegawai.

Subbidang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

- Pelayanan Pensiun

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok berdasarkan Sasaran/Target Renstra Periode Sebelumnya (2016-2021) dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Namun demikian capaian-capaian tersebut diatas secara kelembagaan masih belum optimal yang disebabkan antara lain:

- Rendahnya profesionalisme PNS.
- Pengisian/penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi.
- Penilaian kinerja belum objektif.
- Penerapan peraturan disiplin belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen .
- Persoalan-persoalan internal PNS lainnya.

Hal demikian nampak pada tingkat capaian terhadap sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk itu perlu kiranya beberapa kegiatan pembangunan khususnya dalam rangka mewujudkan sistem manajemen kepegawaian yang lebih berdayaguna sebagai landasan pembinaan dan pengembangan karir PNS perlu mendapatkan perhatian pada periode perencanaan jangka menengah lima tahun mendatang.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021-2024

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang terisi sesuai kompetensi jabatan			60,00%	65,00%	68,00%	70,00%	75,00%	0,00%	75,00%	75,00%	
2	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,23%	0,00%	0,50%	0,50%	
3	Persentase data kepegawaian yang akurat			97,00%	98,00%	99,00%	55,60%	98,59%	0,00%	99,00%	99,00%	
4	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian			3,55	3,60	3,65	3,55	3,41	0,00	3,50	3,50	
5	Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	31,39%	0,00%	40,00%	50,00%	
6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas kinerja			80	82	84	86	78,36	0	79	80	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2023, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kompetensi ASN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

b. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.

Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Penempatan ASN sesuai dengan standar kompetensi jabatan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, akuntabel bersih dan berwibawa menuju *good governance*. Permasalahan ini hendaknya menjadi salah satu perhatian Tim Penilai Kinerja (TPK).

c. Belum optimalnya penerapan sanksi hukuman disiplin terhadap ASN yang melanggar peraturan disiplin.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa disiplin aparatur masih lemah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum diterapkan peraturan disiplin di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku. Disiplin yang lemah menyebabkan hasil kinerja dan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh seorang aparatur tidak akan maksimal. Hal ini

akan menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.

- d. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.

Data pegawai yang lengkap dan *up to date* merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya aparatur. Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap dan akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuai rencana yang disusun dengan kebutuhan pegawai. Untuk itu keberadaan sistem informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih dioptimalkan

- e. Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu peningkatan guna mencapai pelayanan yang cepat, mudah dan tepat.

Kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pelayanan di bidang administrasi kepegawaian merupakan salah satu kunci dalam mendorong terciptanya gairah aparatur dalam bekerja. Bila aparatur merasakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dalam pembinaan dan pengembangan karirnya maka aparatur akan merasa lebih bersemangat untuk memberikan kinerja yang lebih baik karena yakin bahwa setiap yang telah dihasilkannya akan berbuah penghargaan atas apa yang telah diraihnya.

- f. Sarana dan prasarana kantor yang perlu peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor merupakan suatu syarat agar suatu organisasi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan lancar. Disamping itu ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang representatif juga mendorong untuk menciptakan lahirnya pelayanan yang lebih memuaskan bagi yang membutuhkan dan menimbulkan kenyamanan bagi yang menikmatinya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dijelaskan dengan tabel 2.3

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
BKPSDM Kabupaten Solok

Tabel 2.3											
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023											
BKPSDM Kabupaten Solok											
NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.....)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	68,00%	3.378.873.725	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	68,00%	3.378.873.725	
I.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	85,00%	1.395.500.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	85,00%	1.395.500.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	85,00%	80.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	85,00%	80.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	85,00%	700.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	85,00%	700.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN"	85,00%	151.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN"	85,00%	151.500.000	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	85,00%	200.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	85,00%	200.000.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	85,00%	151.500.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	85,00%	151.500.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	85,00%	112.500.000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	85,00%	112.500.000	

I.2	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan	72,00%	1.248.000.000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan	72,00%	1.248.000.000
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	72,00%	368.500.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	72,00%	368.500.000
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	72,00%	217.500.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	72,00%	217.500.000
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	72,00%	662.000.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	72,00%	662.000.000
I.4	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100,00%	223.500.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100,00%	223.500.000
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100,00%	71.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100,00%	71.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100,00%	152.500.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100,00%	152.500.000
I.5	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pembinaan terhadap Aparatur	100,00%	511.873.725	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pembinaan terhadap Aparatur	100,00%	511.873.725
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00%	74.873.725	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00%	74.873.725
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100,00%	121.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100,00%	121.000.000
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100,00%	251.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100,00%	251.000.000
	Pelayanan proses izin perceraian		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	100,00%	65.000.000	Pelayanan proses izin perceraian		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	100,00%	65.000.000

II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	50,00%	9.747.531.556	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	50,00%	9.747.531.556	
II.1.	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	100,00%	2.550.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	100,00%	2.550.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100,00%	2.550.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100,00%	2.550.000.000	
II.2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,00%	7.197.531.556	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,00%	7.197.531.556	
	Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	100,00%	150.000.000	Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	100,00%	150.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100,00%	6.005.286.431	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	100,00%	6.005.286.431	
	- Pelatihan Kepemimpinan				4.387.053.836	- Pelatihan Kepemimpinan				4.387.053.836	
	- Pelatihan dasar CPNS				1.618.232.595	- Pelatihan dasar CPNS				1.618.232.595	
	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	100,00%	198.045.125	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	100,00%	198.045.125	
	- Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi				198.045.125	- Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi				198.045.125	

III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100,00%	8.400.740.475	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100,00%	8.400.740.475	
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100,00%	192.206.175	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100,00%	192.206.175	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	6.363.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	6.363.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00%	6.997.725	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100,00%	6.997.725	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%	5.926.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%	5.926.200	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	1.251.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	1.251.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%	6.384.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%	6.384.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	100,00%	162.170.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100,00%	162.170.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	3.113.250	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	3.113.250	
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan	100,00%	7.556.031.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan	100,00%	7.556.031.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	7.552.300.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	7.552.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100,00%	2.184.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100,00%	2.184.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%	1.547.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%	1.547.000	

III.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	130.643.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	100,00%	130.643.100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00%	26.397.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00%	26.397.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	77.849.100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100,00%	77.849.100	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	26.397.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	26.397.000	
III.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100,00%	237.021.068	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100,00%	237.021.068	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100,00%	2.403.293	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100,00%	2.403.293	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Persediaan Kantor yang Disediakan	100,00%	50.400.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Persediaan Kantor yang Disediakan	100,00%	50.400.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	16.253.475	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	16.253.475	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	8.591.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	8.591.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	138.373.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	138.373.200	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		21.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		21.000.000	
III.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	100,00%	24.123.082	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	100,00%	24.123.082	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	100,00%	2.205.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	100,00%	2.205.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komusikasi, Sumber Daya Air dan listrik	100,00%	20.028.082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komusikasi, Sumber Daya Air dan listrik	100,00%	20.028.082	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kanotr yg disediakan	100,00%	1.890.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kanotr yg disediakan	100,00%	1.890.000	

III.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	100,00%	260.716.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	100,00%	260.716.050	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00%	135.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00%	135.450.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	72.607.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	72.607.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%	45.203.550	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%	45.203.550	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%	7.455.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%	7.455.000	
				TOTAL	21.527.145.756					21.527.145.756	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok bahwa BKPSDM Kabupaten Solok mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Solok Tahun 2022, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok pada Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok berusaha untuk menyelaraskan dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dapat dioptimalkan. Dari beberapa penyelarasan tersebut ada beberapa sasaran strategis yang sesuai dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, antara lain:

Tabel 3.1

Tabel Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok

No.	Sasaran Strategis		
	BKN	BKD Propinsi Sumatera Barat	BKPSDM Kabupaten Solok
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN.	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur.	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima.		Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN.		Meningkatnya tata kelola organisasi
4	Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN.		
5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN.		
6	Terwujudnya peningkatan kualitas		

	pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN.		
7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja didasarkan atas rumusan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Penetapan tujuan strategis diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran organisasi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki.

Tujuan strategis di jabarkan lagi menjadi tujuan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan birokrasi yang kapabel

Tujuan 2: Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi

Sasaran startegis yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam seluruh kegiatannya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang dan berorientasi pada hasil.

Sasaran perencanaan strategis dijabarkan lagi menjadi sasaran perencanaan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN, dengan indikator:
 - a. Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang terisi sesuai kompetensi jabatan;
 - b. Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN;
 - c. Persentase data kepegawaian yang akurat;
 - d. Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian.
2. Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan, dengan indikator:
 - a. Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
3. Meningkatnya tata kelola organisasi, dengan indikator:
 - a. Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Volume/ Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI 4 mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih					
1 Meningkatkan birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	1 Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	1 Persentaser formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang terisi sesuai kompetensi jabatan	%	68
			2 Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	5
			3 Persentase data kepegawaian yang akurat	%	98
			4 Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian	%	3,65
			5 Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	65
2 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Nilai akuntabilitas kinerja	2 Meningkatnya tata kelola organisasi	5 Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	84

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Tahun 2023 mengelola sebanyak 3 (Tiga) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatanyang pelaksanaannya berlokasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun program dan kegiatan yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Terdiri dari 4 kegiatan:

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

dengan 6 sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Mutasi dan Promosi ASN

dengan 3 sub kegiatan:

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN

dengan 2 sub kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

dengan 4 sub kegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan proses izin perceraian

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terdiri dari 2 kegiatan:

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

dengan 1 sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

dengan 4 sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
- Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Terdiri dari 6 kegiatan

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

dengan 7 sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
dengan 3 sub kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan 3 sub kegiatan:
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
dengan 6 sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan 3 sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan 4 sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rumusan rencana program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2023 dan Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
BKPSDM Kabupaten Solok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
														13	14	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.089.038.900						3.589.200.000		
03	02	2	01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				300.208.300						1.505.275.000		
03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	-	1 Dokumen	85%	83.917.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	84.000.000
03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	-	1 Dokumen	85%	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	1 Dokumen	735.000.000
03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN"	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN		1 Dokumen	85%	71.591.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN"	1 Dokumen	159.075.000
03	02	2	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN		1 Lembaga	85%	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	250.000.000
03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN		7 Dokumen	85%	40.478.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7 Dokumen	159.075.000
03	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN		250 Dokumen	85%	53.221.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	250 Dokumen	118.125.000

03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN						591.017.000					1.310.400.000	
03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan		500 Dokumen	72%	137.832.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	386.925.000
03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan		800 Dokumen	72%	106.664.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	228.375.000
03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan		2 Dokumen	72%	346.520.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	695.100.000
03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN						34.958.500					234.675.000	
03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian		10 Orang	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang	74.550.000
03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian		394 Orang	100%	33.958.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	394 orang	160.125.000
03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						162.855.100					538.850.000	
03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur		1 Dokumen	100%	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	80.000.000
03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur		- 400 Orang	100%	50.752.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	400 orang	127.050.000
03	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur		- 6 Laporan	100%	67.102.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 Laporan	263.550.000
03	02	2	04	09	Pelayanan proses izin perceraian	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur		2 Dokumen	100%	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	2 Dokumen	68.250.000

04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	1 Laporan	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	6.005.286.431
					- Pelatihan Kepemimpinan							-					-
					- Pelatihan dasar CPNS							-					-
04	02	2	02	08	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	3 Dokumen	100%	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	3 Dokumen	-
					- Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi							198.045.125					-
03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							27.427.021.942					8.442.975.919
03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah							193.564.087					201.816.484
03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	2 Dokumen	100%	6.060.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.681.150
03	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	1 Dokumen (RKA)	100%	6.664.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.347.611

03	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	1 Dokumen (RKA-P)	100%	5.644.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.222.510
03	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	1 Dokumen (DPA)	100%	1.192.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.314.180
03	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	1 Dokumen (DPA-P)	100%	6.080.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.703.200
03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	1 Laporan (LKJIP)	100%	164.958.587	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	170.278.920
03	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	4 Laporan (Evaluasi RKPD Triwulan)	100%	2.965.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.268.913
03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							26.679.317.226			7.556.030.970	
03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan Aturan	-	457 Orang/ Bulan	100%	26.675.586.226	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	457 orang/bulan	7.552.299.970
03	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan Aturan	-	1 Laporan	100%	2.184.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.184.000
03	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan Aturan	-	1 Dokumen	100%	1.547.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.547.000

03	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.047.179					25.329.236	
03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	-	2 Laporan	100%	2.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2.315.250
03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komusikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	-	12 Laporan	100%	16.147.179	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	21.029.486
03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kanotr yg disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	-	2 Laporan	100%	1.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1.984.500
03	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											273.751.853	
03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	-	2 unit	100%	134.302.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	142.222.500
03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	-	2 Unit	100%	70.021.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	76.237.875
03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	-	1 unit	100%	44.092.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	47.463.728
03	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	-	10 Unit	100%	7.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	7.827.750
JUMLAH										28.517.060.842					18.923.872.350	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah memuat program yang akan dilaksanakan serta pagu indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya. Rencana kerja dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Pendanaan Indikatif

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	68%	Rp. 1.089.038.900
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50%	Rp. 1.000.000
3	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	Rp. 27.427.021.942
Jumlah			Rp. 28.517.060.842

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Solok.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil yang ditargetkan.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, akan ada potensi rencana kerja yang sudah tertuang ke dalam Dokumen Renja tidak dapat direalisasikan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi target capaiannya di kemudian hari. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai dengan sasaran yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Solok.

Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat.

Arosuka, Maret 2022
KEPALA



AFRIALDI, SE, MM
NIP. 19750429 199403 1 002